

BAB V

STRATEGI PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT

Informasi dari hasil analisa lingkungan strategis, strategi pembangunan, arah kebijakan, skala prioritas dan analisa gap dalam implementasi dipakai sebagai acuan dalam penetapan rencana strategis penerapan electronic government Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Dengan memperhatikan beragam parameter dan indikator – indikator yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung atas penerapan electronic government di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, baik mikro, makro, kuantitatif maupun kualitatif, dan berdasarkan hasil analisa baik statistical maupun analitical, strategis maupun taktis, dirumuskan rencana strategis penerapan electronic government xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai berikut:

1. Pembangunan, operasionalisasi dan pengembangan Infrastruktur pada tingkat kapasitas yang proporsional serta menjangkau seluruh instansi dan perangkat pemerintahan di Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Pendayagunaan infrastruktur teknologi informasi untuk peningkatan kualitas operasional dan pelayanan
3. Pendayagunaan ekstra kapasitas infrastruktur teknologi informasi untuk pelayanan pada masyarakat umum dan pelaku dunia usaha dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah
4. Penerapan standardisasi dan pengembangan berbasis kesinambungan atas penerapan seluruh komponen teknologi informasi untuk menjamin

kompatibilitas, interoperabilitas dan kesiapan pengembangan (*expandability*).

5. Pengembangan sistem basis data terintegrasi sebagai bagian dari infrastruktur dasar dengan tingkat kapasitas yang sesuai dan kemungkinan pengembangan yang luas.
6. Pengembangan dan pembangunan solusi sistem dan aplikasi berbasis teknologi informasi sesuai dengan alur proses kerja, tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan kebutuhan masing – masing unit kerja secara spesifik
7. Integrasi seluruh solusi sistem dan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam satu kerangka besar solusi electronic government yang komprehensif dan terpadu
8. Peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai penggerak electronic government pada semua area pembangunan, meliputi perencanaan, penerapan, operasional, perawatan, pengembangan dan manajemen
9. Mendorong, memfasilitasi dan mengatur pemanfaatan peluang pengembangan sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi bagi masyarakat umum dan pelaku dunia usaha
10. Pembangunan fasilitas peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sekaligus sebagai katalisator peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor pendidikan
11. Pembangunan fungsi riset dan pengembangan teknologi informasi
12. Pembangunan dan penerapan sistem operasional berbasis manajemen kegiatan dengan penyiapan lembaga manajemen kegiatan sebagai perencana dan pengawas program penerapan electronic government.

13. Penyiapan perangkat hukum dan regulasi yang mengatur pendayagunaan electronic government atas pemerintah, masyarakat dan pelaku dunia usaha